



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT**

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

---

Tahun Sidang	: 2019-2020
Masa Persidangan	: III
Rapat Ke	: 12
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Kepala Badan Pelaksana BPKH
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 11 Mei 2020.
Waktu	: Pukul 14.00 WIB.
Tempat	: Virtual / Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Strategi dan Kebijakan Program Kemaslahatan Umat BPKH 2. Isu – Isu Aktual dan Solusinya
Ketua Rapat	: H.YANDRI SUSANTO, Spt.
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 40 dari 52 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 12 Orang Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Kepala Badan Pelaksana BPKH.

**I. PENDAHULUAN:**

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 15.00 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua H.M.R. Ihsan Yunus, ME.Con.,Std, Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlis Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

## II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI secara virtual dengan Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) membahas **“Strategi dan Kebijakan Program Kemaslahatan Umat BPKH dan Isu-isu Aktual,”** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI mendesak Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk melakukan riset atau kajian dan mitigasinya dalam rangka meningkatkan prinsip kehati-hatian investasi dan penempatan dana haji dari risiko perekonomian nasional dan global yang akan berdampak terhadap keuangan haji.
2. Komisi VIII DPR RI mendesak kepala Badan Pelaksana BPKH untuk segera melakukan kajian pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji jika dilaksanakan dengan skenario pembatasan kuota dengan memperhatikan protokol kesehatan Covid-19.
3. Komisi VIII DPR RI mendesak kepala Badan Pelaksana BPKH untuk merefocusing anggaran program kemaslahatan umat yang tidak terealisasi akibat dampak covid-19 untuk kegiatan prioritas penerima program kemaslahatan lainnya.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program kemaslahatan umat, Kepala Badan Pelaksana BPKH untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
  - a. Memperbaiki pola kerjasama kemitraan yang lebih sinergi dalam penyaluran program kemaslahatan umat
  - b. Mengkaji kembali kebijakan sasaran penerima program kemaslahatan umat agar lebih bermanfaat bagi kemaslahatan umat Islam.
  - c. Melakukan percepatan penyaluran program kemaslahatan umat dengan mempertimbangkan prioritas penerima, sebaran dan aspirasi masyarakat.
  - d. Mengalokasikan anggaran dari program kemaslahatan untuk membantu para Ustadz, Guru Ngaji dan para Khotib yang terdampak Covid-19
  - e. Mengkaji pola kemitraan kerjasama mitra BPKH dalam penyaluran program kemaslahatan umat, di antaranya mitra anggota Komisi VIII DPR RI.
  - f. Melakukan evaluasi pengadaan penyediaan barang sembako dan barang terkait lainnya serta distribusinya dalam program kemaslahatan umat.

- g. Meningkatkan anggaran program kemaslahatan umat untuk pemberdayaan ekonomi umat sebagai penerima dari program kemaslahatan umat sebagai dampak dari covid-19.

### III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 17.21 WIB.

PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI  
KETUA,



H. YANDRI SUSANTO, Spt.